

CIVIL RESPONSIBILITY FOR SEXUAL ABUSES BY PUBLIC SERVICES (ANALYSIS OF SEXUAL HARASSMENT CASSES BY THE CHIEF OF KPU R.I)

JURNAL

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

**Disusun Oleh:
DINDA SALWANI
2006200294**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2024**

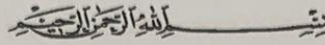


UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengesah surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PTX/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, 16 Oktober 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DINDA SALWANI
NPM : 2006200294
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH PEJABAT PUBLIK (ANALIS KASUS PELECEHAN SEKSUAL OLEH KETUA KPU RI)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

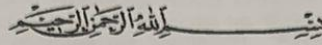
ANGGOTA PENGUJI:

1. Asliani Harahap, S.H., M.H.
2. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.
3. Dr. Tengku Erwin Syahbana, S.H., M.Hum



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)



**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

NAMA : DINDA SALWANI
NPM : 2006200294
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH PEJABAT PUBLIK (ANALIS KASUS PELECEHAN SEKSUAL OLEH KETUA KPU RI)

Penguji : 1. Asliani Harahap, S.H., M.H. NIDN. 0126066802
2. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H. NIDN. 0116018002
3. Dr. Tengku Erwin Syahbana, S.H., M.Hum NIDN. 0006076814

Lulus, dengan nilai **A** Predikat **Istimewa**

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 16 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

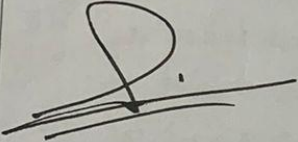
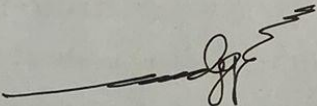
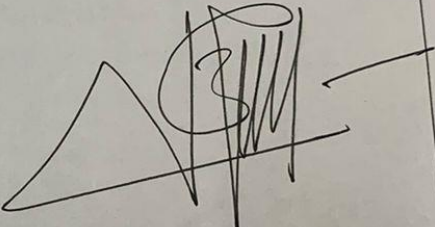
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH
PEJABAT PUBLIK (ANALISIS KASUS PELECEHAN SEKSUAL
OLEH KETUA KPU RI)
Nama : DINDA SALWANI
Npm : 2006200294
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 16 Oktober 2024

Dosen Penguji

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| <u>Asliani Harahap, S.H., M.H</u> NIDN. 0126066802 | <u>Dr. Bisdan Sigalingging, S.H.,M.H.</u> NIDN. 0121018602 | <u>Dr. Tengku Erwinsyahbana,S.H., M.Hum</u> NIDN. 0103118402 |

Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendaftar surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : DINDA SALWANI
NPM : 2006200294
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH PEJABAT PUBLIK (ANALIS KASUS PELECEHAN SEKSUAL OLEH KETUA KPU RI)
PEMBIMBING : Dr.Tengku ErwinSyahbana,S.H.,M.Hum.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 04 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc.Prof.Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Assoc.Prof.Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

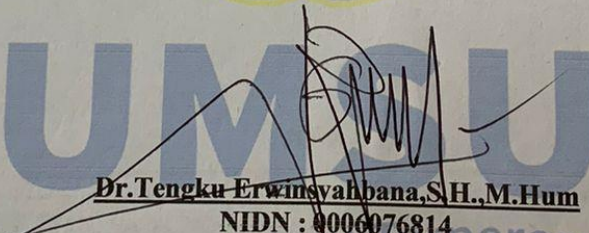
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DINDA SALWANI
NPM : 2006200294
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
OLEH PEJABAT PUBLIK (ANALISIS KASUS PELECEHAN
SEKSUAL OLEH KETUA KPU RI)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Dosen Pembimbing


Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
NIDN : 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengabdikan surai to agar disalahkan nomor dan bangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahumedsun](#)

[umsunedan](#)

[umsunedan](#)

[umsunedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DINDA SALWANI
NPM : 2006200294
Program : STRATA-1
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
OLEH PEJABAT PUBLIK (ANALIS KASUS
PELECEHAN SEKSUAL OLEH KETUA KPU RI)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 04 Oktober 2024



Dinda Salwani



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN JURNAL

Nama : DINDA SALWANI
NPM : 2006200294
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH PEJABAT PUBLIK (ANALISIS KASUS PELECEHAN SEKSUAL OLEH KETUA KPU RI)
Pembimbing : Dr.Tengku Erwinsyahbana,S.H.,M.Hum

| No. | TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|-----|-------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1. | 25 Juli 2024 | Diskusi judul jurnal | |
| 2. | 7 Agustus 2024 | Revisi judul jurnal | |
| 3. | 8 Agustus 2024 | Diskusi mengenai rumusan masalah | |
| 4. | 9 Agustus 2024 | Sistematika penulisan | |
| 5. | 10 Agustus 2024 | Revisi Pembahasan | |
| 6. | 12 Agustus 2024 | Acc publikasi jurnal dan acc temp | |
| 7. | 28 September 2024 | Seminar proposal | |
| 8. | 31 September 2024 | Acc jurnal | |
| 9. | 2 Oktober 2024 | Acc diujikan | |

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.H.
NIDN : 0006076814



JOURNAL OF LAW, POLITIC AND HUMANITIES (JLPH)

E-ISSN: 2962-2816 | P-ISSN: 2747-1985

<https://dinastires.org/JLPH>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

LETTER OF ACCEPTED

Date : 13 August 2024

ID : JLPH07318/LOA/08/2024

Dear Authors,

Based on the results of the review, the article was declared **ACCEPTED** for publication in the **Journal of Law, Politic and Humanities (JLPH)** journal in the **Vol. 4 No. 6 September - October 2024** edition, The article will be published no later than **09 September 2024**. The article is available online at <https://dinastires.org/JLPH>

Submission Details

| | |
|-------------|--|
| Author | Dinda Salwani (1); Tengku Erwin Syahbana (2) |
| Affiliation | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Sumatera Utara, Indonesia (1); Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Sumatera Utara, Indonesia, (2) |
| Title | Civil Responsibility for Sexual Abuses by Public Services (Analysis of Sexual Harassment Cases by the Chief of KPU R.I) |

Best Regards,

Agus Surono

Editor in Chief



Document Validation Scan this Code

JLPH INDEX



PUBLISHER

Journal of Law, Poliitic and Humanities (JLPH) is managed and published by Dinasti Research Publisher under the auspices of the Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (DINASTI)

<https://dinastirev.org/JIHPH>

Email: dinasti.info@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.38035/jlph>.

Received: xx October 202x, Revised: xx October 202x, Publish: xx November 202x

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> (size 10)

Civil Responsibility for Sexual Abuses by Public Services (Analysis of Sexual Harassment Cases by the Chief of KPU R.I)

Dinda Salwani¹, Tengku Erwin Syahbana²

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Sumatera Utara, Indonesia, dindasalwani24@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Sumatera Utara, Indonesia, tengkuerwins@umsu.ac.id

Corresponding Author: dindasalwani24@gmail.com¹

Abstract: The General Election Commission is a state institution that organizes General Elections in Indonesia. It consists of commissioners who have competence in their field of work. The selection of commissioners as public officials is based on the results of the selection committee selection which is then recommended to the President, for further suitability testing at Commission II of the Republic of Indonesia DPR. Commissioners who pass the suitability test will then be appointed by the President for a term of five years. As public officials, KPU commissioners are those who are believed to have very good personalities and have never been involved in any legal violations. They work based on applicable laws and the KPU code of ethics. The KPU commissioners will elect one of them to be appointed as Chairman of the KPU. The General Election Commission itself is headquartered in Jakarta. This research is normative juridical descriptive, a research method that seeks to describe and interpret the object of research according to what it is, aiming to provide data resulting from researching a situation or existing facts which will then be described clearly so that it can be accepted and understood as to the basis for imposition. the legal rules that apply to the Chairman of the KPU who commits a violation of the law, the legal consequences of the sexual harassment he commits and the form of accountability of the Chairman of the KPU for violations of the law both ethically and regarding the application of criminal law. The results of the research in this paper found that the Chairman of the KPU, based on the facts of the code of ethics trial held by the DKPP, was legally and clearly proven to have violated the KPU code of ethics as Chairman of the KPU for his actions of sexually harassing a female subordinate who served on the Overseas Election Committee in The Hague, Dutch. Confirming all acts of sexual harassment as stated in the DKPP decision Number 90/PKE-DKPP/V/2024, dated 3 July 2024. With responsibility, he was permanently dismissed as Chairman of the Indonesian KPU.

Keyword: KPU Chairman, Sexual Harassment, Violation of the KPU Code of Ethics.

INTRODUCTION

Sexual crime is a serious problem in this age of globalization. Sexual offences indicate the non-functioning of a norm in a person (actor) which results in the violation of the rights and interests of another person who is the victim. Increasing and growing sexual crime, the Women's Chamber mentions several forms of sexual violence, including rape, sexual harassment, sexual exploitation, sexual torture, sexual slavery and intimidation/aggression with sexual nuances, including threats or attempts to rape.

According to Sumera (2013) the crime of sexual harassment has occurred everywhere and is not only a matter of national law of a country but is already a legal matter of all countries in the world and has become a global issue. Sexual harassment is a crime, and crime is a harmful, inappropriate, unacceptable anti-social act that can cause a riot in society.

The various forms of sexual violence mentioned above, sexual harassment is one of the most common form of sexual crime in Indonesia and even around the world. Keny, Samah and Yin Fah say "Sexual harassment is known as a global social phenomenon that affects all working class, regardless of age, color, ethnicity, social status or work category". The perpetrators of sexual crimes today are not only from the middle to the bottom of society, but almost the entire layer of society is potentially the perpetrator of crimes of sexual abuse or sexual harassment. Between the groups the most frequent victims of sexual abuse are women, so that in almost every case, women are the most likely victims.

Recently, there are frequent cases of crimes involving sexual harassment. Sexual harassment can happen anywhere and anytime, one of them is like sexual abuse at work. The victim by the perpetrator is often accompanied by a promise of a job reward or a promotion, even threats, whether explicitly or not. Sexual harassment as an act of abuse of the honour of others Sexual abuse can also occur without any promises or threats, but it can make the workplace unrestful, hostile, and stressful, Whether done by an individual or a group to someone directly related to the sex of the party concerned.

Sumarni and Setyowati in Putriningsih add that sexual harassment can also be understood as all the attitudes and behaviors that lead to unpleasant sexual behavior, ranging from views, symbols, body movements, hands, ugly pissing, long-sighted views, cutting cakes, referring to porn images, stealing kisses, flattering, strangling certain parts of the body, even to rape.

Sexual abuse is usually committed by men and is directed at women in the sexual field who are not liked by women because they feel humiliated, but if they are rejected there is a chance that they will suffer other bad consequences. Sexual harassment is not just a form of violation of the rights of others that belongs to criminal acts but more than that. Sexual harassment is not always an act of rape or sexual violence.

As experienced by a woman named Cindra Aditi Tejakinkin, where she was a member of the Foreign Election Commission (PPLN) Indonesian elections in The Hague, Netherlands. Cindra acknowledged that she was forced to engage in sexual intercourse by Hasyim Asy'ari who is also known as the Chairman of the KPU for the period 2022-2027. The incident that Hasyim Asy'ari committed against Cindra Aditi Tejakinkin occurred exactly in March 2024, at the time of the arrival of the work visit of the President of the KPU in The Hague, the Netherlands.

From the time she experienced the sexual abuse, Cindra Aditi Tejakinkin felt depressed in doing her job and confused not knowing what to do, until in the end she told the abuse she experienced to Maria Dianita Prosperiani who was also under her legal authority. Where later, Maria Dianita Prosperiani, made and filed a complaint to the Honorary Council of Election Organizers (DKPP) on April 18, 2024. In the legal proceedings against the Ethical Chairman of the KPU, his current position has been decided to be permanently dismissed as the Chairperson of KPU by the DKPP (Honorary Council of the Organizers of Elections) on the decision of the meeting of DKPP on July 3, 2024. It is stated that the acts of asylum of the

Chairman of the KPU are recognised and legally proven and violate the legal and ethical norms of KPU.

Based on the background of the above issues then the formula of the problem in this study is: How the legal consequences of public officials (Chairman KPU) who committed violations of the law and code of ethics, and how the legal responsibility of public officers (CEO KPU), on the sexual harassment of members of the PPLN.

METHOD

Methodology has several meanings, namely (a) the logic of scientific research, (b) the study of research procedures and techniques, and (c) a system of methods and techniques of research. Based on this, it can be said that research method is research aimed at revealing truth systematically, methodologically, and consistently. Through the research process, analysis and construction of the data has been collected and processed.

Descriptive research is a method of research that attempts to describe and interpret objects as they are, aims to provide data resulting from examining a situation or facts that are present in the society that will be clearly described so that it can be accepted and understood by the reader and can describe how sexual harassment is a part of sexual violence that can be classified as a crime to be held accountable by the perpetrator according to applicable law.

RESULTS AND DISCUSSION

As a result of the law of the Public Officer (Chairman of the KPU) who commits a violation of the Law and the Code of Ethics

Pursuant to article 1, paragraph 4, of the Regulations of the Honorary Council of Electoral Organizers No. 2 of 2017 on the Code of Ethics and Guidelines for the Conduct of Election Organizers, the code of ethics of electoral organizers (Regulations No. 2, of 2017), the ethics code is a unity of moral, ethical and philosophical foundations that are guidelines of conduct for the organizers of elections, which are obligations or prohibitions, actions and/or statements that should or should not be made by the organizer of the elections. Further Article 22 of the 2017 DKPP Regulation No. 2 mentions the sanctions that may be accepted when the organizers of the elections are involved in violations. The sanctions are divided into a suspension, a warning, and a temporary to permanent suspension.

A violation of the KPU code of ethics by the Chairman of KPU in connection with sexual harassment committed against a female member of the Foreign Election Commission (PPLN) in The Hague, the Netherlands. Getting a negative response from The Indonesian people, for being able to influence their partisan perception of the electoral process.

Based on that, public confidence in the KPU can deteriorate accumulatively. It's because violations of the code of ethics aren't the first to happen. The Chairman of the KPU was also severely sanctioned for violating ethics in several other legal cases, so motivating the creation of a women's alliance to protest against the position of Hasyim Asy'ari as Chairperson of the CPU, the Chair of the PCU was deemed to have defrauded the honour of the election organizer's agency with his relationship as the Chief General of CPU R.I.

In the legal proceedings against the Ethical Chairman of the KPU, his current position has been decided to be permanently dismissed as the Chairperson of KPU by the DKPP (Honorary Council of the Organizers of Elections) on the decision of the meeting of DKPP on July 3, 2024. It is stated that the acts of asylum of the Chairman of the KPU are acknowledged and legitimately proved and violate the legal and ethical norms of KPU.

Hasyim Asy'ari for his sexual abuse of his subordinate, namely a woman named Cindra Aditi Tejakinkin, who works as a member of the Foreign Election Commission (PPLN) in The Hague, Netherlands, Cindra ADITI TJAKINKIN herself can proceed her legal case to the area of criminal law by strapping Asyari with asusila articles related to sexual

harassment (Articles 281, 289, and 294 KUHP) with the threat of a prison sentence of up to 9 years.

Legal Responsibility of Public Officers (Chairman of the KPU) for Acts of Sexual Harassment of Members of the PPLN

A female PPLN member Hasyim to the DKPP on April 18, 2024 on alleged violation of the code of ethics of the electoral organizer Approaching, begging, and acting asusila. "The act was done to our client member of the PPLN who has a working relationship with the Chairman of the KPU. However, Chairperson has been bound in a legitimate marriage," said the representative of the LKBH FHUI, Aristo Pangaribuan, on April 18, 2024.

Hasyim's asylum was allegedly carried out between September 2023 and March 2024. The two met several times when Hasyim was on duty visits to Europe and the victims visited Indonesia. Besides, there is an active attempt by Hasyim to beg and approach the victims as long as they do not meet.

It was revealed in the facts at the DKPP crossroads Hasyim "forced Cindra Aditi Tejakinkin to make physical contact" which made the victim have physical health problems. Initially, the victim refused, but Hasyim forced the complainant to make physical contact so that the truth happened. The event took place on October 3, 2023 in the Netherlands. Cindra Aditi Tejakinkin claimed to have called Hasyim in the evening to come to his hotel room.

In other facts, Hasyim Asy'ari proved to have abused his office by using various facilities of intimidation and associating himself with power. Hasyim also gave promises and manipulated information to curse the victim in order to fulfill his personal desires. The Hasyim act uses a power relationship against the victim, but does not threaten work-related matters.

The Honorary Council of the Organizers of Elections or DKPP read the judgment of the case asylum case No. 90/PKE-DKPP/V/2024 violation of ethics Chief of KPU Hasyim Asy'ari was convicted of sexual harassment. DKPP fired Hasyim who allegedly sexually abused a PPLN member named Cindra Aditi Tejakinkin in The Hague, the Netherlands.

Admitted the complainant's complaint in its entirety. To impose a permanent suspension sanction on the opposing Hasyim Asy'ari as the chairman of the General Election Commission has arrested members counted since this ruling was read," DKPP Assembly Chairman Heddy Lugito said on July 3, 2024. This decision marks the end of Hasyim Asy'ari's career as Chairman of the KPU.

CONCLUSION

1. As a result of the law under Law No. 12 of 2022 on the Criminal Procedure for Sexual Violence, with the threat of a sentence of nine years in prison. Whoever commits a violation of the law and the code of ethics of the KPU, he is subject to an ethical trial organized by the DKPP (Honorary Council of Electoral Organizers) on his resignation from his office as the Chairman of the CPP, and after this decision the victim of sexual harassment can then proceed to the area of criminal law in order to give effect to the perpetrator and learning for others.
2. During the DKPP trial against the Chairman of the KPU, the facts of the trial have proved the truth of the acts of Hasyim Asy'ari as the Chief of KPU committing sexual harassment to a member of the PPLN named Cindra Aditi Tejakinkin in The Hague, Netherlands. As the result of the DKPP decision in its trial No. 90/PKE DKPP/V/2024. Hasyim Asy'ari was found guilty and had to resign as Chairman of the KPU as a form of responsibility.

REFERENSI

- Aryo Wasisto. 2024. "Dampak Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Terhadap Kepercayaan Publik". *Info Singkat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan* Vol. XVI, No. 3
- Ayu, et.al. 2013. "Selamatkan Anak, Selamatkan Indonesia". *Parlementaria*. Edisi 104, TH. XLIII
- B. Simandjuntak. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito
- Bagong Suyanto. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media
- Kamal Kenny, Asnarulkhadi Abu Samah, dan Benjamin Chan Yin Fah. 2011. "Sexual Harassment: Is It A Case of Gendered Perspective, *International Journal of Humanities and Social Science, Centre of Promoting Ideas*", Vol. 1, No. 19
- M. Sudrajat Bassar, 1986. *Tindak-Tindakan Tertentu di dalam KUHP*. Bandung: Remaja Karya.
- M. Sumera. 2013. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan". *Lex et Societatis*. Vol 1, No. 2. halaman 39-49
- Poerwandari, E. K.. 2000. Kekerasan terhadap perempuan: tinjauan psikologi feministik, dalam Sudiarti Luhulima (ed) "Pemahaman Bentuk- bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternative pemecahannya", Jakarta: Kelompok kerja "convention watch" Pusat Kajian Wanita dan Jender, Jakarta: Universitas Indonesia
- Putriningsih, et.al. 2012. "Intensi Pekerja Rumah Tangga Korban Pelecehan Seksual Untuk Melapor". *Jurnal Psikologi Ilmiah*.
- Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tria Sutrisna, Krisiandi. Korban Asusila Ketua KPU Buka Suara, Bersyukur Hasyim Dipecat. <https://nasional.kompas.com>. Diakses: Agustus 2024.
- Aryo Putranto Saptohutomo. Ketua KPU Dipecat DKPP soal Asusila, Korban Didorong Laporkan Polisi". <https://nasional.kompas.com>. Diakses: Agustus 2024
- Purnamasari, D. D. (2024, 6 Februari). Mahfud MD: Perlu Diingat bahwa KPU Sudah Berkali-kali Melanggar Etika. [kompas.id](https://www.kompas.id). <https://www.kompas.id>. Diakses: Agustus 2024
- Rachel Farahdiba Regar. Kronologi Tindakan Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari terhadap Anggota PPLN, Langgar Kode Etik Lalu Dipecat. <https://nasional.tempo.co>. Diakses: Agustus 2024.
- Annisa. Pasal Hukuman Pelecehan Seksual Dalam KUHP. <https://fahum.umsu.ac.id>. Diakses: Agustus 2024

Similarity 16% Flags

Standard Report ⓘ

English Report Unavailable [More Info](#)

16% Standard Similarity

Filters

Sources

Show overlapping sources ⓘ

1 Publication

Arie Sulistyoko. "PEMAKZULAN PRESIDEN DALAM ... 2%

4 text blocks 83 matched words

2 Publication

Subardjo Subardjo. "Penggunaan Hak Angket Ole... 1%

5 text blocks 60 matched words

3 Publication

Lanang Sakti, Maulana Syekh Yusuf. "Implikasi Yur... 1%

2 text blocks 57 matched words

TELAH MELALUI PROSES PEMERIKSAAN PLAGIARISME

4 Publication

Sitti Nurkhaerah, Hamiyuddin Hamiyuddin. "FAK... <1%

4 text blocks 38 matched words

Nama : DINDA SALWANI
NPM : 2006200294



5 Publication

Wa Ode Lutfian. "Permasalahan pengendalian da... <1%

2 text blocks 34 matched words